

Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Oleh:

¹.Paul Adryani Moento; ².Fitriani; ³. Albertus Yosep Maturan

Jurusan Ilmu Administrasi Negara- Fisip-Unmus.
Email.paulmoento@unmus.ac.id

Abstrak

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi dalam kehidupan berpolitik, untuk mewujudkan demokrasi politik yang sehat diperlukan partisipasi masyarakat politik. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan memakai Teknik mengumpulkan sebuah data melalui pengamatan serta proses wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik, Komisi pemilihan umum daerah Merauke selaku institusi yang berwenang melibatkan pihak media dan tokoh masyarakat yang dianggap layak dengan memberikan serta menyampaikan sosialisasi materi tata cara memilih kepada pemilih pemula di kalangan pelajar dan mahasiswa se kabupaten Merauke. Kemudian, Komisi pemilihan umum daerah Merauke melakukan komunikasi politik dengan melalui koordinasi dengan organisasi partai politik yang ada di kabupaten Merauke. Koordinasi tersebut berupa himbauan Komisi pemilihan umum daerah Merauke agar partai politik memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Merauke dalam hal verifikasi data pemilih.

Kata kunci : Partisipasi politik; Komunikasi politik; Sosialisasi politik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum di suatu ruang publik sampai pada sekarang sangat dominan membahas tentang pemilihan presiden. Dalam menghadirkan sebuah pelayanan public yang luar biasa, diperlukan sebuah wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, sangat perlu dilaksanakan analisis yang mendalam terhadap wadah tersebut sehingga menghasilkan pemilihan umum yang optimal. Sangat banyak calon dalam sebuah pesta pemilihan umum yang sulit untuk kita kenal satu per satu. Oleh karena itu, masyarakat perlu melihat dan mengenali secara detail para calon yang akan bertarung. Fadli et al. (2018) Pemilihan umum adalah sebuah wadah yang sah untuk

mengganti orang yang berkuasa. Selain itu, pemilihan umum juga memiliki faedah yang dapat melakukan evaluasi oleh rakyat atas sebuah kinerja yang telah dilakukan oleh seseorang dalam kepemimpinannya. Pemilihan umum juga adalah suatu cara memilih seseorang yang akan menduduki jabatan politik. Hal tersebut merupakan sebuah partisipasi yang dilakukan secara legal.

Demokrasi merupakan proses metode politik dengan pola kinerja untuk menentukan pemimpin politik. Masyarakat dalam sebuah negara berhak memilih salah satu pemimpin politik sesuai hati nuraninya, Nugroho (2015). Di negara Indonesia, proses demokrasi sangatlah jelas tertuang pada sila ke empat yaitu memiliki makna sebuah hikmah yang memiliki kebijaksanaan, berkumpul dan berbicara bersama semua elemen masyarakat. Sebuah partisipasi politik masyarakat dalam dunia demokrasi memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap keabsahan masyarakat terhadap jalannya sistem pemerintahan. Demokrasi bisa disebut secara luas yaitu pemerintahan yang asalnya dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat ditandai dengan adanya tuntutan dari sebagian besar masyarakat sebagai sebuah input, kemudian tuntutan itu di ambil serta di bicarakan secara bersama oleh masyarakat yang masuk dalam sebuah organisasi legislatif dan selanjutnya menghasilkan sebuah kebijaksanaan atau aturan, Simanjuntak (2017) .

Demokrasi dalam kehidupan mengacu pada sebuah aturan pemerintahan yang mulanya di tentang keberadaanya, disebabkan oleh aturan yang terkandung didalamnya memunculkan sebuah konflik. Ahli filsafat plato mengemukakan sistem monarki adalah yang paling sempurna, sedangkan Aristoteles mengemukakan republik konstitusional adalah sistem yang paling sempurna. Seiring berjalannya waktu, demokrasi dipandang sebagai suatu proses yang paling baik dan tepat untuk seluruh sistem kelembagaan politik serta seluruh elemen masyarakat yang modern. Penelitian yang dilakukan oleh unesco memeberikan kesimpulan bahwa demokrasi adalah pola yang tertata baik dari seluruh proses politik serta memiliki keunggulan dan kelemahan komparatif, M. Muslih (2012).

Partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujudnya ialah adanya sebuah keleluasaan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul bersama dalam suatu wadah yang sudah dibentuk secara bersama-sama. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki jabatan publik dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu, yang selama ini di sebut pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi yang dapat diperoleh dari perbaikan atau pengembangan ketrampilan. Hubertus Oja; Funisia. Lamalewa; Elisabeth L.R Kore, (2018).

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Ririhena dan Fitriani (2018). Penamaan partisipasi politik di laksanakan pada kegiatan sitiap orang dari semua elemen sistem politik, misalnya pemilih yang ikut serta dengan menyalurkan pilihannya, contohnya sorang pejabat negara yang berpartisipasi dalam menentukan regulasi di daerahnya. Penamaan tersebut sangat di utamakan pada pelaksanaan politik dari pada kegiatan politik, karena masyarakat dalam sebuah negara ikut serta dengan mendistribusikan talentanya dalam politik. Menurut ramlan subakti partisipasi politik merupakan sebuah aktifitas yang meminta sebuah tuntutan serta menjalankan hak dan kewajiban dalam sebuah negara yang bersifat aturan serta memilih wakil-wakil rakyat, Suharyanto (2014)

Pada mulanya, proses aktivitas pemilihan umum yang ada di negara ini di laksanakan atas asa- asas yang berlaku yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, untuk kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Pertanggungjawaban merupakan ucapan kata-kata yang dikeluarkan dalam proses kebijaksanaan melalui jabatan yang di emban oleh

sesorang untuk memperlancar demokrasi, Surya Kusuma Wardana (2018). Pemilihan umum sangat penting bagi suatu negara, terkhusus di Indonesia telah tertulis secara sah dalam UUD 1945. Mekanisme pemilihan umum merupakan suatu proses penyerahan kedaulatan rakyat kepada wakil yang telah ditentukan untuk memiliki kekuasaan. Seperti yang telah terjadi selama proses pemilihan umum, yaitu rakyat memiliki otoritas tertinggi untuk memilih pejabat penguasa sesuai hati nurani secara bebas dan rahasia. Pada proses pelaksanaan pemilihan umum, komisi pemilihan umum adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang menyelenggarakan pemilihan umum, serta di bantu oleh masyarakat dan elemen penting lainnya dengan tujuan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

Kabupaten Merauke merupakan daerah yang terletak di propinsi Papua. Berdasarkan data yang dikeluarkan pada tahun 2014 oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Merauke jumlah penduduk yang bermukim di Distrik Merauke berjumlah 125.574 jiwa yang bermukim 10 wilayah kelurahan. Pada penyelenggaran pemilihan umum pada tahun 2014 yang lalu, Kabupaten Merauke sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di ujung timur Indonesia sukses menyelenggarakan pemilihan umum. Menurut Hubertus (2016) institusi sangat perlu untuk dapat mengatur serta mengontrol suatu ketentuan yang sudah di atur sedemikian rupa, agar institusi di ruang public sanggup dan dapat menyediakan proses kerja yang optimal. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merauke telah sukses menyelenggarakan pemilihan umum yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aman, damai, dan terkendali. Komisi pemilihan umum melakukan optimalisasi keikutsertaan masyarakat pada pemilihan umum dengan menerbitkan regulasi yang mengharuskan seluruh masyarakat yang layak secara persyaratan sebagai pemilih, agar bisa mempergunakan hak pilihnya melalui 3 model daftar pemilih tambahan untuk masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, Timpal (2015).

Pada Distrik Merauke data yang diperoleh dari komisi pemilihan umum Daerah Kabupaten Merauke, jumlah pemilih pada pemilihan legislatif bulan April 2014

berjumlah 40.071 pemilih dari 63.674 daftar pemilih tetap yang tersebar di 10 kelurahan, dan pada pemilihan presiden dan wakil presiden bulan juli 2014 berjumlah 37.018 pemilih dari 65.913 daftar pemilih tetap yang tersebar disepuluh kelurahan. Mekanisme dalam penetapan sebagai daftar pemilih tetap yakni Komisi pemilihan umum Daerah menginput data jumlah penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari data di atas, kita ketahui adanya perbedaan yang signifikan antara pemilih pada saat pemilihan legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam jumlah pemilih yang datang untuk memilih tidak semua terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Dalam hal ini koordinasi berjalan baik antara pihak Komisi pemilihan Umum Daerah Merauke dengan pihak Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Merauke. Seyogianya koordinasi membutuhkan sebuah keharusan setiap elemen yang ada dalam suatu Lembaga agar saling memahami tentang pelaksanaan tugas antara anggota satu dengan anggota lainnya sehingga Lembaga tersebut tidak bekerja sendiri. Oleh karena itu, kesatuan tugas merupakan dasar dari sebuah koordinasi. Kemudian kesatuan perbuatan dengan mengandalkan seorang pimpinan untuk melakukan pengaturan yang baik terhadap aktifitas individu, agar tercipta suatu keserasian dalam mencapai keberhasilan. Kesatuan tindakan tersebut merupakan keharusan dari seorang pimpinan untuk mendapatkan suatu koordinasi yang sempurna dengan melakukan pengaturan waktu agar apa yang direncanakan dapat memperoleh hasil yang memuaskan, Rinaldi (2014).

Data jumlah pemilih yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke yang telah di sebutkan pada paragraf sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat Distrik Merauke pada proses pemilihan umum semakin menurun. Hal tersebut ditandai masih adanya masyarakat yang tidak ikut serta dalam proses pencoblosan di Tempat pemungutan suara. Yang perlu mendapat penelitian dalam riset ini ialah strategi Komisi pemilihan umum Daerah Merauke dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemillihan umum. Komisi pemilihan umum Daerah Merauke tentu saja tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan strategi

tersebut tetapi didukung oleh beberapa elemen penting yaitu, Tokoh Masyarakat, Media, dan Partai Politik. Ketiga elemen di atas harus bekerja maksimal agar pola partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum selanjutnya dapat meningkat. Komisi pemilihan umum merupakan ujung tombak pemerintah dari seluruh kegiatan pemilihan umum yang ada di negara ini, oleh karena itu masyarakat sendiri sebagai pemilih harus mendukung upaya pemerintah melalui Komisi Pemilihan umum melalui proses pemilihan umum. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke tepatnya di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke. Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terperinci tentang strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Merauke, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebuah proses penelitian dengan memahami sebuah fenomena tentang suatu hal yang dirasakan oleh tempat atau subyek penelitian merupakan sebuah penelitian kualitatif. Kemudian, proses yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan informasi yang terkini mengenai keadaan tentang perihal yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, sangat diperlukan data yang bersifat primer dan sekunder. Penelitian ini berproses dengan cara mengumpulkan sebuah data melalui pola wawancara dengan pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, proses analisis data penelitian dilakukan dengan tahap: reduksi data, penyajian data, serta melakukan pengambilan sebuah kesimpulan, Moleong J.L (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu proses penyaluran dengan memberikan informasi politik kepada khalayak serta khalayak tersebut memberikan umpan balik melalui tanggapan dan reaksi terhadap gejala-gejala sistem. Sosialisasi politik ditentukan oleh kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan di seseorang berpijak, oleh karena itu sosialisasi politik sangat bermanfaat untuk mengambil langkah pasti

mengenai pilihan politiknya, Rush, Michael dan Althoff (2008). Pandangan masyarakat terhadap proses sosialisasi politik dalam pemilihan umum merupakan hal penting, karena dengan adanya sosialisasi diharapkan semakin memberikan sebuah pemahaman kepada para pemilih khususnya pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang kegiatannya memberikan sebuah sikap serta orientasi politik terhadap seseorang atas keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Pasaribu (2017).

Komisi pemilihan umum daerah Merauke memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat melalui pemberian materi tentang kemanfaatan pemilihan umum, peserta-peserta yang bertarung dalam ajang pemilihan umum, ajakan untuk memberikan suara saat pemungutan suara, tata cara pemilihan umum, jadwal pemilihan umum, proses kampanye yang positif, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara serta pengumuman hasil perhitungan suara. Dalam kegiatan tersebut, Komisi pemilihan umum daerah Merauke memberikan sosialisasi politik dengan sasaran target pemilih pemula, yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah, serta perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Merauke. Kemudian sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum daerah Merauke bekerja sama dengan pihak media dengan memberikan pengajaran positif kepada masyarakat yaitu pendidikan politik kepada masyarakat, agar tercipta pemahaman yang baik dalam menentukan sikap politiknya.

Porses sosialisasi politik dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tingkat kemampuan dalam membaca situasi politik dalam meningkatkan kapabilitas politik masyarakat. Kapabilitas adalah kemampuan anggota organisasi untuk melakukan sesuatu baik yang bersifat kapasitas maupun peluang guna meraih tujuan yang diinginkan. Kapasitas lebih tertuju pada apa yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi, sedangkan peluang lebih pada pilihan yang tersedia bagi anggota organisasi untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan personal dan sebagainya akibat dari penggunaan kapasitasnya, sehingga kapabilitas diformulasikan sebagai kapasitas individual, Hubertus Oja; Funisia. Lamalewa; Elisabeth L.R Kore, (2018). Sosialisasi politik dilakukan untuk sebagai proses politik untuk meningkatkan

kesadaran politik masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses politik dan pembangunan

Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi penting dalam sebuah sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis bahkan menjadi urat nadi proses politik. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, komunikasi politik merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, karena komunikasi politik bertujuan untuk membentuk, membina serta mempertahankan pendapat umum (opini publik) tentang proses pemilihan umum dan menjadi sarana perangsang kepada masyarakat agar turut serta dalam pemilihan umum. Selain itu, Melalui komunikasi politik, hal yang paling nyata untuk digunakan sebagai penilaian berhasilnya pemberian informasi adalah bertambahnya jumlah masyarakat yang menyetujui dan menjalankan apa yang telah diberikan. Sangat di pertegas adalah masyarakat memiliki kesediaan menjadi patuh dan taat kepada orang yang menyampaikan komunikasi politik. Secara nyata dan tepat ialah masyarakat bersedia untuk menyalurkan suaranya dalam sebuah pemilihan umum, Susanto (2013).

Hasil penelitian dilapangan menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum daerah merauke selalu berkoordinasi dengan pihak peserta pemilihan umum yaitu partai politik, agar melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai hal-hal teknis dalam pemilihan umum. Komisi pemilihan umum daerah merauke juga memeberikan himbauan kepada partai politik peserta pemilu agar melakukan pendekatan kepada masyarakat sesuai denga koridor demi terciptanya partisipasi politik masyarakat. Proses komunikasi sebagai kegiatan edukasi yang perlu dilakukan agar kemampuan masyarakat dalam segala hal meningkat, sehingga masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri setiap saat. Untuk mendukung proses komunikasi, berbagai media komunikasi (modern-tradisional; massa-individu-kelompok) perlu dimanfaatkan dengan kreatif, Hubertus Oja dan Hesty Tambajong (2018). Untuk meningkatkan nilai keefektifan dalam komunikasi politik tidak hanya dilakukan hanya pada organisasi

formal akan tetapi dilakukan pada organisasi informal bahkan komunikasi dapat dilakukan sampai kepada masyarakat yang ada di desa/kampung. Hal ini senada dengan pendapat dari David Laiyan; Bambang Tri Harsanto; Retna Dyah Puspita (2018) bahwa komunikasi yang dirasakan selama ini oleh masyarakat bahwa proses komunikasi hanya berlangsung dalam forum formal saja dan belum maksimal mendorong proses komunikasi aktif melalui pendekatan informal terhadap masyarakat kampung. Proses komunikasi dapat meningkatkan rasa kepercayaan public terhadap organisasi sector public dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah baik fungsi politik maupun fungsi pembangunan.

Hal Senada dengan pendapat dari Hubertus Oja dan Vinsenco R.Serano (2017) rasa percaya dapat membuat orang bertindak sebagaimana yang diarahkan oleh orang lain karena ia meyakini bahwa tindakan yang disarankan orang lain tersebut merupakan salah satu bentuk pembuktian kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keyakinan pada diri seseorang atau sekelompok orang muncul dari kondisi terus menerus yang berlangsung secara alamiah ataupun buatan (dikondisikan). Rasa percaya bisa diwariskan tetapi harus dipelihara dan dikembangkan karena rasa percaya bukan merupakan suatu hal yang absolut. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai organisasi public yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus bisa memberikan nilai pelayanan berupa memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan, Rino Bahari Adi Pradana (2017).

Penetapan daftar pemilih tetap

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang nyata mengarahkan suatu hal yang resmi dari suatu regulasi yang berupa cara mengatur sebuah masukan untuk mendapatkan keluaran bagi masyarakat, Wibawa (1994). Dalam penetapan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum daerah merauke tentu melewati beberapa proses panjang, dan dalam penetapan daftar pemilih tetap

tersebut Komisi pemilihan umum daerah merauke bekerja sama dengan pihak Dinas kependudukan dan catatan sipil. Penetapan daftar pemilih tetap yang dilakukan Komisi pemilihan umum daerah merauke belum berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dengan masih adanya kekeliruan dalam hal daftar pemilih tetap. Masalah tersebut tidak semata dilimpahkan kepada pihak Komisi pemilihan umum daerah merauke, tetapi ada masyarakat dan Dinas kependudukan dan catatan sipil. Daftar pemilih tetap merupakan sebuah susunan pemilih sementara telah diperbaiki PPS, kemudian diperkuvasi oleh PPK, selanjutnya ditetapkan oleh Komisi pemilihan umum atau Komisi independent di setiap kabupaten atau kota (KPU 2018).

Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Merauke dalam hal yang mengurus bagian kependudukan yang juga mitra kerja Komisi pemilihan umum daerah merauke dalam pendataan masyarakat yang akan ditetapkan sebagai calon pemilih. Komisi pemilihan umum daerah merauke meminta data terbaru dari Dinas kependudukan dan catatan sipil tentang jumlah penduduk yang sudah dikategorikan sebagai pemilih, selanjutnya jumlah penduduk yang sudah terdaftar ditetapkan daftar pemilih sementara di verifikasi dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Namun seringkali Komisi pemilihan umum daerah merauke menjumpai masalah klasik yaitu, orang yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai pemilih. Hal tersebut dikarenakan dari pihak keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal. Hasil di atas menyebutkan bahwa Komisi pemilihan umum daerah Merauke belum bekerja secara maksimal, dikarenakan masih adanya permasalahan yang ditemui dalam penetapan daftar pemilih tetap.

KESIMPULAN

Komisi pemilihan umum daerah merauke memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Melalui kegiatan sosialisasi politik, Komisi pemilihan umum daerah merauke melibatkan media dan tokoh masyarakat dengan memberikan materi kepada pemilih pemula di kalangan pelajar dan mahasiswa se kabupaten Merauke. Kemudian, Komisi pemilihan umum daerah merauke melakukan komunikasi politik dengan proses koordinasi dengan

organisasi partai politk. Koordinasi tersebut berupa himbauan Komisi pemilihan umum daerah merauke agar pertain politik memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Merauke dalam hal verifikasi data pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- David Laiyan; Bambang Tri Harsanto; dan Retna Dyah Puspita. “ Implementasi Program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku) Di Distrik Jagebob Kabupaten Merauke” Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 7 No 1; 2018
- Fadli, Muhammad, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, and Achmad Zulfikar. 2018. “Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015.” Aristo Vol 6 No 2; 2015, 301.
- Hubertus, Oja. “Penerapan Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik.” Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial Vol 5, No 1, 2016
- Hubertus Oja dan Vinsenco R.Serano. “Anlisis Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke” Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 5 No 2; 2017
- Hubertus Oja; Funisia. Lamalewa; Elisabeth L.R Kore. "Penguatan Human Capital Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke" Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 7 No 2, 2018
- Hubertus Oja dan Hesty Tambajong, "Strategi *Community Development* Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Padi Di Kampung

- Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke" Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 7 No 1; 2018
- KPU. 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- M. Muslih. "Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Di Dalam UUD RI 1945 Pasca Amandemen Dan Implemenasinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia M." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi; Vol 12; No 3; 2012
- Moleong J.L. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia." Jurnal Pemikiran Sosiologi; Vol 1 No 1; 2015
- Pasaribu, Payerli. 2017. "Peranan Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik The." Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik; Vol 5 No 1; 2017
- Rinaldi. "Koordinasi Dan Pelayanan Publik." Jurnal Administrasi Pembangunan; Vol 2 No 2; 2014
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press.
- Rino Bahari Adi Pradana. "Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Merauke" Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 6 No 2; 2017
- Ririhena dan Fitriani "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas APBD Kabupaten Merauke" Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, Vol 7 No 2; 2018
- Simanjuntak, Madonna. 2017. "Pengaruh Sikap Sosial Siswa Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan." Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017
- Suharyanto, Agung. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah." JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area; Vol 2 No 2; 2014

- Surya Kusuma Wardana. “Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Baik, Dan Berwibawa.” jurnal Unnes Vol 4 No 3; 2018.
- Susanto, Eko Harry. 2013. “Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum.” Jurnal Kajian Komunikasi.
- Timpal, Willians. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Menangani Pemilih Khusus Tambahan Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Tomohon1.” Jurnal Politico; Vol 2 No 6; 2015
- Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.